

## Pemda Kota Cirebon Launching Aplikasi Sampean dan Website Smart City



CIREBON- Pj Wali Kota Cirebon melaunching Sistem Aplikasi Mobile Kepegawaian (Sampean) dan website Smart City. Aplikasi tersebut diminta digunakan sebaik-baiknya untuk menunjang kinerja PNS.



“Jangan sampai sekarang sudah dilaunching tapi tidak dimanfaatkan,” ungkap Pj Wali Kota Cirebon, Dr.H. Dedi Taufik, M.Si, saat pelaksanaan acara Pengambilan Sumpah dan Penyerahan SK PNS, Pelepasan PNS Purnabaki Periode Agustus 2017 dan Juni 2018 serta Launching Aplikasi Sampean dan Website Portal Smart City di salah satu hotel di Kota Cirebon. Karena itu Dedi meminta agar aplikasi yang berisi pendataan yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian ini benar-benar dimanfaatkan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip., M.Si., menjelaskan jika aplikasi Sampean sudah bisa diunduh di playstore android. “Melalui aplikasi tersebut bisa mengecek kehadiran, tunjangan yang diberikan, berapa yang dipotong dan data kepegawaian lainnya. “Namun saat ini baru by person, artinya baru memantau data diri sendiri,” ungkap Iing. Namun ke depannya DKIS akan merancang jika aplikasi Sampean juga bisa digunakan seorang atasan untuk memantau kehadiran dan kinerja bawahannya. “Tapi ini bukan absen online,” ungkap Iing. Karena logikanya, kehadiran itu di kantor.

Untuk website smart city, setiap orang di seluruh Indonesia saat ini bisa membuka website tersebut. “Tinggal buka [smartcity.cirebonkota.go.id](http://smartcity.cirebonkota.go.id),” ungkap Iing. Sejumlah fitur ditampilkan di website tersebut terkait Kota Cirebon sebagai smart city pun bisa dilihat. “sedangkan untuk jaringan, kami juga sudah menyediakan free wifi corner di beberapa titik,” ungkap Iing.



Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon, H. Anwar Sanusi, S.Pd., M.Si., menyambut baik dilaunchingnya aplikasi Sampean tersebut. “Ini sebuah keharusan. Kita harus memberikan satu layanan yang cepat, tidak bisa lagi dibikin lambat,” kata Anwar. Terlebih aplikasi ini bisa diunduh melalui telepon berbasis android yang sehari-hari digunakan. Aplikasi Sampean sendiri menampilkan 4 fitur informasi kepegawaian. Dimulai dari biodata yang terdiri dari profil, pangkat dan riwayat pekerjaan, absensi secara real time termasuk prediksi tunjangan tambahan pegawai (TPP) yang diterima pada bulan berjalan, dokumen elektronik dan pencarian data pegawai.

## Untuk Kedua Kalinya, Kota Cirebon Raih WTP



CIREBON- Kota Cirebon kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017. WTP diraih atas hasil kerjasama yang dilakukan dengan semua unsur pemerintahan yang ada di Kota Cirebon.



Penyerahan predikat WTP dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, kepada Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, dan ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, S.Ip., M.Si., Rabu, 30 Mei 2018 di Bandung. Ada 10 daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan hari ini masing-masing Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi dan Kota Depok. Semuanya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sambutannya Arman Syifa mengungkapkan jika kegiatan ini bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” ungkap Arman.

Pemeriksaan keuangan ini menurut Arman juga tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berdampak pada potensi dan indikasi kerugian negara, tetap harus diungkapkan dalam LHP.



Kecurangan maupun pelanggaran tersebut menurut Arman bisa mempengaruhi opini tapi bisa juga tidak mempengaruhi opini. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan. “Bukan jaminan tidak adanya pelanggaran yang ditemui atau kemungkinan timbulnya pelanggaran di kemudian hari,” kata Arman.

Namun, lanjut Arman, masih ada sejumlah temuan yang masih perlu memperoleh perhatian dari pemerintah daerah. Diantaranya aset tanah yang dimiliki pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat, fasos dan fasum yang belum diserahkan, kesalahan alokasi penganggaran dan lainnya.



Sementara itu Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si, menyambut baik predikat WTP untuk Kota Cirebon dari BPK. “Ada 4 kriteria yang dinilai,” ungkap Dedi. Yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Predikat ini menurut Dedi merupakan kebanggaan bagi pemerintah Kota Cirebon. Semua didapatkan berkat kerja sama dan gotong royong dari semua pihak.



Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, S.Ip, M.Si, mengaku sangat bersyukur Kota Cirebon mendapatkan dua kali berturut-turut predikat WTP. "Kami apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh stakeholder, OPD dan penyelenggaraan pemerintah di daerah sehingga bisa meraih WTP," ungkap Edi. Sedangkan terkait dengan hasil rekomendasi dari BPK menurut Edi nanti mereka akan membahas bersama-sama antara panja dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).



## KOTA CIREBON DAPATKAN PENGHARGAAN UHC JKN-KIS AWARD DARI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



CIREBON- Kota Cirebon mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penghargaan didapatkan karena kerja sama dari semua pihak terkait.

Pj Wali Kota Cirebon, Dr. H Dedi Taufik, M.Si, hari ini, Rabu (23/5) menerima penghargaan UHC JKN-KIS langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dan gotong royong semua pihak,” ungkap Dedi. Ke depannya Dedi berharap kesehatan warga Kota Cirebon semakin membaik. Sehingga ke depannya, rumah sakit bisa kosong, yang berarti semua warga Kota Cirebon dalam kondisi sehat.

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) JKN KIS didapatkan dikarenakan Kota Cirebon telah mengcover masyarakatnya hingga mencapai 100 persen menggunakan JKN-KIS. Untuk wilayah Jawa Barat, yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung. Penghargaan ini pertama kalinya diraih Kota Cirebon selama pelaksanaan program pemerintah pusat dalam menyelenggarakan JKN-KIS dalam mengcover kesehatan masyarakatnya.

Ada pun total penduduk Kota Cirebon yang sudah memiliki JKN sebanyak 322.349. Terdiri dari berbagai segmen, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang dibayarkan pemerintah, Pekerja Penerima Upah (PPU) dimana didalamnya terdapat, PNS, TNI, Polri, pegawai swasta dan lainnya. Serta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yaitu peserta mandiri yang daftar dan membayar sendiri iuran setiap bulannya.

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabar, Mohammad Edison, bersyukur jika Kota Cirebon menjadi kota yang pertama UHC. “Kota Cirebon menjadi point penting untuk menyebarkan UHC di Jawa Barat,” ungkap Edison. Kemudian disusul Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya selama sisa waktu 7 bulan ini akan semakin banyak daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang mendekati angka 99 persen kepesertaan JKN-KIS. “Terima kasih kepada Pak Wali dan jajaran Dinas kesehatan yang dengan bergotong royong memungkinkan coverage kepesertaan JKN-KIS menjadi luas,” ungkap Edison.

Dengan cakupan yang sudah mencapai 99 persen, ini berarti pemerintah daerah telah mengoptimalkan semua segmen kepesertaan dalam program JKN. Deklarasi di Kota Cirebon sebagai daerah yang telah

UHC sebenarnya telah dilakukan sejak November tahun lalu, namun penghargaan dari Presiden baru diberikan hari ini.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. H. Edy Sugiarto, M.Kes, menjelaskan bahwa sejak adanya BPJS, fasilitas layanan kesehatan memang berlebihan. “Di luar kapasitas,” ungkapnya. Di tingkat puskesmas saja yang biasanya antriannya 200 bisa mencapai 680. Apalagi di rumah sakit. Karena itu, lanjut Edy, pihaknya akan melakukan terobosan diantaranya menggunakan layanan reminder atau pengingat. Nantinya semua pasien yang biasa menjalani pengobatan akan diingatkan akan antrian dan hari kapan mereka berobat di rumah sakit. Melalui layanan ini, diharapkan tidak ada lagi antrian yang panjang di rumah sakit. “Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS),” ungkap Edy.